

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

1. Sejarah Kabupaten Sleman

Secara administratif, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijktsblad no. 11 tahun 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta (Mataram) dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Secara hierarkhis, Kabupaten membawahi distrik yang dikepalai seorang Panji.

Dalam Rijktsblad tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kalurahan).

Pada tahun yang sama, berturut-turut dikeluarkan Rijktsblad no.12/1916, yang menempatkan Gunung Kidul sebagai kabupaten keempat wilayah Kasultanan Yogyakarta. Kemudian disusul dengan Rijktsblad no. 16/1916 yang mengatur keberadaan Kabupaten Kota. Sedangkan Rijktsblad 21/1916 mengatur keberadaan kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, pada tahun

Pembagian wilayah Kesultanan Yogyakarta tersebut ternyata pada tahun 1927 mengalami penyederhanaan melalui munculnya Rijktsblad no. 1/1927. Enam Kabupaten yang terdapat di wilayah kasultanan disederhanakan menjadi 4 kabupaten yakni: Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman mengalami penurunan status menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta.

Pada tahun 1940, wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami reorganisasi dengan munculnya Rijktsblad Van Jogjakarta no. 13/1940 tanggal 18 Maret 1940. Rijktsblad tersebut membagi wilayah kasultanan Yogyakarta tetap dalam 4 Kabupaten dengan pemampatan pada distrik masing-masing kabupaten. Kabupaten Sleman sendiri dibagi menjadi 4 distrik. Pembagian wilayah tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1942 dengan Jogjakarta Kooti, Kasultanan Yogyakarta lebih memerinci wilayahnya sehingga Sleman masuk ke dalam kawedan Kabupaten Yogyakarta. Pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah Kabupaten.

Jogjakarta Koorei angka 2 (8 April 1945) menjadikan Sleman sebagai pemerintahan Kabupaten untuk kedua kalinya dengan **KRT Pringgodingrat** sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman

kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo (Kecamatan Sleman).

Dalam kondisi gedung-gedung pelayanan masyarakat yang memprihatinkan, Bupati Sleman KRT Pringgodingrat pada tahun 1947 memindahkan pusat pelayanan kabupaten ke Ambarukmo, di Petilasan Dalem serta bekas pusat pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia (saat ini pendopo hotel Ambarukmo). Dalam hal ini, Ambarukmo merupakan pusat kegiatan pelayanan pemerintahan, bukan ibukota kabupaten.

Pada tahun yang sama Bupati KRT Pringgodingrat diganti oleh KRT Projodiningrat. Dalam periode ini, tepatnya tahun 1948, wilayah Kasultanan Yogyakarta mulai melaksanakan pemerintahan formal. Sesuai dengan UU no. 22 Tahun 1948, penyebutan wilayah Kabupaten Sleman adalah Kabupaten Sleman.

Pada masa itu pemerintah RI mengeluarkan UU no. 1 tahun 1957 mengenai Pembagian Daerah Republik Indonesia dan Aturan Otonomi Daerah, maka penyebutan Kabupaten Sleman berubah menjadi daerah Swatantra. Sebagai implementasinya Departemen Dalam Negeri menerbitkan peraturan bahwa selain memiliki seorang Bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai Kementrian Dalam Negeri, Kabupaten juga harus memiliki kepala daerah yang dipilih legislatif (DPRD).

Dengan kata lain, dalam periode pemerintahan ini, sebuah kabupaten memiliki 2 (dua) Kepala Daerah. Terpilih sebagai Kepala Daerah Swatantra

6 Tahun 1959 dan no. 5 Tahun 1960, untuk memberlakukan kembali UUD 1945, pemerintahan Kabupaten Sleman kembali dikepalai seorang Bupati/Kepala Daerah, yang dijabat oleh KRT. Murdodiningrat.

2. Karakteristik Kabupaten Sleman

2.1 Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

2.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah yaitu :

- a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;
- b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
- c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

- a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu).
Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping, serta

sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.

- b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (*buffer zone*). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, yang memiliki 86 desa dan 1212 dusun. Wilayahnya berbatasan dengan semua kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Propinsi Jawa Tengah.

3. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

3.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2011- 2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu "Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin,

3.2 Misi

Misi dari Kabupaten Sleman adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

B. Gambaran Umum Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Sleman

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Keberadaan Bagian Humas adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

2. Visi dan Misi Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Humas merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, oleh karena itu Visi dan Misi Bagian Humas mengacu pada Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

Visi Sekretariat Daerah yaitu :

“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah pengelolaan tata pemerintahan daerah yang baik oleh aparatur yang professional, memiliki spirit, etos kerja, dan komitmen tinggi serta didukung struktur organisasi yang handal, dapat lebih menjamin kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, tranparansi dan akuntabilitas publik.

Misi adalah pernyataan tentang cara bagaimana organisasi dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi Sekretariat Daerah adalah :

- a. Mewujudkan rumusan kebijakan daerah yang berkualitas
- b. Mewujudkan tata laksana pemerintahan daerah yang tertib
- c. Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien
- d. Mewujudkan pelayanan administrasi pemerintah daerah yang prima

3. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Humas

Tugas dan fungsi bagian humas telah tertuang dalam Peraturan Bupati sleman

Pasal 76

Bagian hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang dokumentasi, informasi, publikasi dan protokol.

Pasal 77

Bagian hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bagian Hubungan Masyarakat.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang dokumentasi, informasi, publikasi dan protokol.
- c. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang dokumentasi dan informasi.
- d. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang publikasi
- e. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang protokol
- f. Penyelenggaraan publikasi dan keprotokolan pemerintah daerah
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bagian

Pasal 78

Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 79

Subbagian Dokumentasi dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Dokumentasi dan Informasi
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintah daerah.
- c. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintah daerah.
- d. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintah daerah.
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintah daerah.
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subbagian

Pasal 80

Subbagian Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintah daerah.

Pasal 81

Subbagian Publikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Publikasi.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan publikasi pemerintah daerah
- c. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyelenggaraan publikasi pemerintah daerah
- d. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan publikasi pemerintah daerah
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintah daerah
- f. Penyelenggaraan publikasi pemerintah daerah
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Publikasi

Pasal 82

Subbagian Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintah daerah.

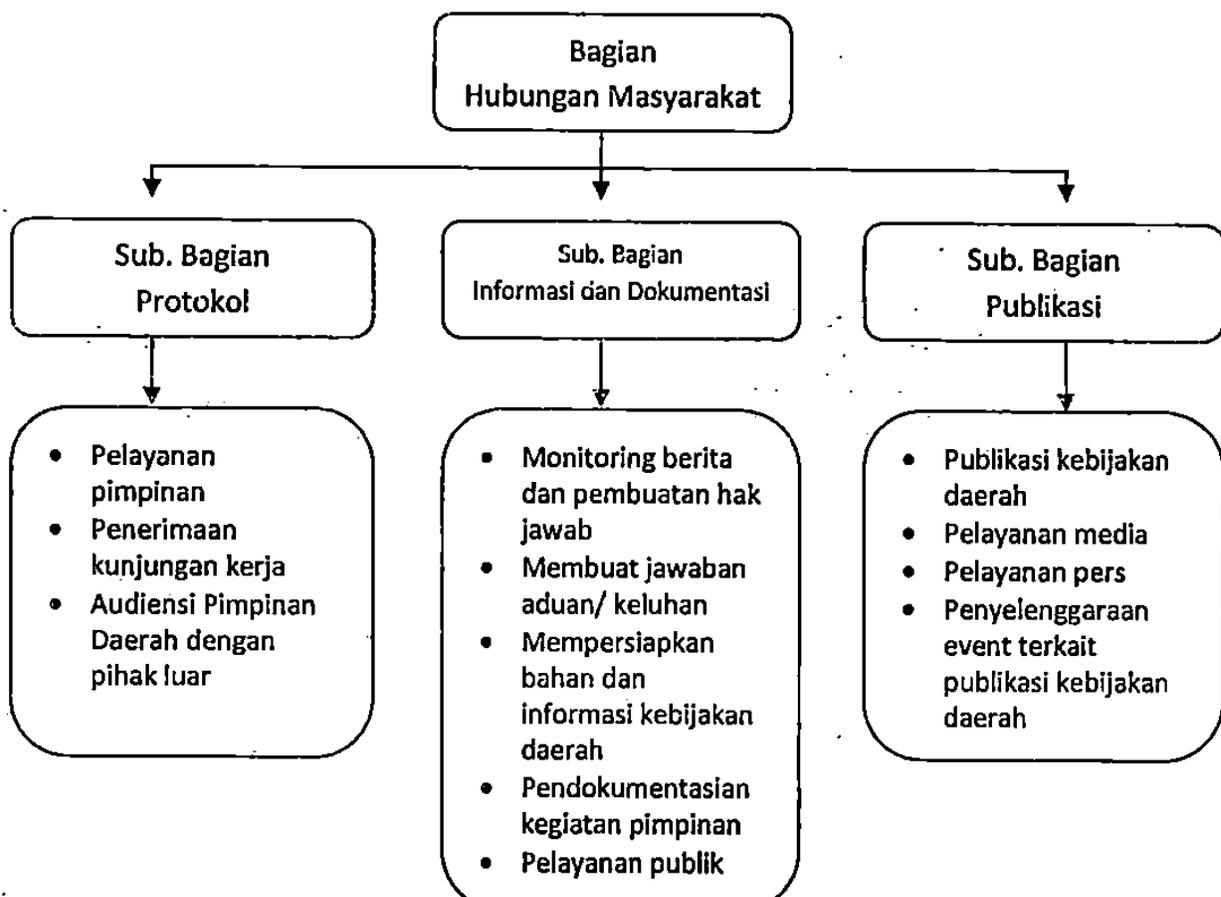
Pasal 83

Subbagian Protokol dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

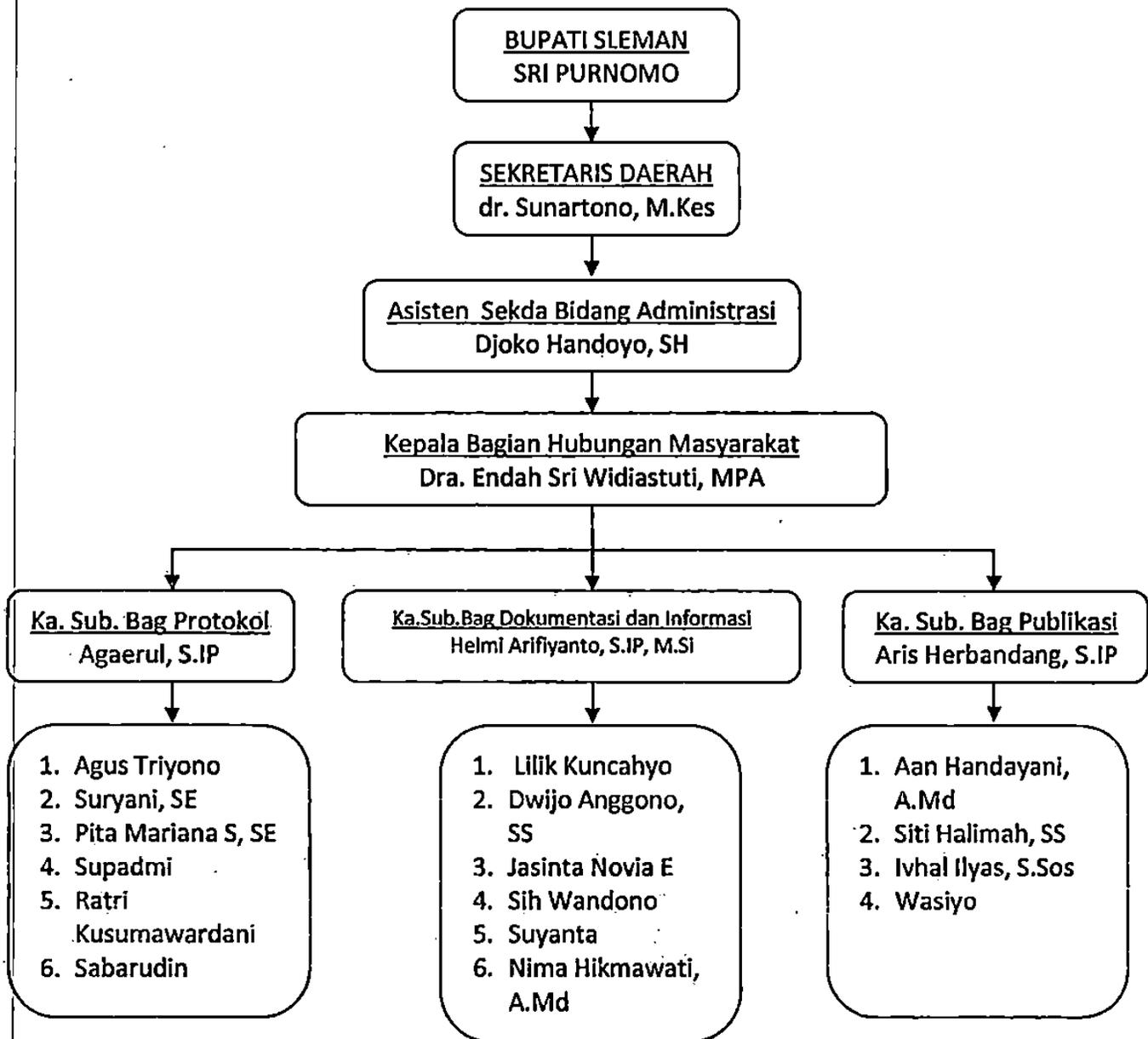
- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Protokol
- b. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan keprotokolan pemerintah daerah
- c. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah

4. Struktur Bagian Hubungan Masyarakat Sleman

4.1 Struktur Program Bagian Hubungan Masyarakat



4.2 Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat



C. Gambaran Umum Website Kabupaten Sleman

Website www.slemankab.go.id merupakan salah satu sarana publikasi yang penggunaannya bertujuan untuk memberikan informasi baik kepada pihak internal maupun eksternal Pemerintah kabupaten Sleman. Selain menjadi sarana publikasi, website www.slemankab.go.id juga berfungsi

sebagai wadah bagi masyarakat melakukan *bottom up communication* melalui fasilitas 'Surat Warga' yang menjadi bagian integral dalam website ini.

Desain dan penyusunan isi website didasarkan pada keperluan dan kepentingan stakeholder di Pemerintah Kabupaten Sleman. Warna website dibuat dengan didasarkan pada warna identitas Sleman yakni biru diambil dari panji panji 'Mega Ngampak' yang merupakan salah satu identitas Kabupaten Sleman. Desain grafis dibuat dengan desain minimalis untuk memudahkan pengguna mengakses informasi yang dibutuhkan.

Gambar 2.1.

Tampilan Website Sleman



Konten website slemankab.go.id memiliki beberapa bagian :

1. Header

Header merupakan bagian teratas dari website slemankab.go.id. Pada bagian ini website slemankab.go.id memuat sejumlah foto-foto kegiatan dan *land mark* serta unggulan pariwisata di Kabupaten Sleman. Pada bagian ini juga dicantumkan sejumlah data statis yaitu profil daerah, sejarah Sleman, struktur organisasi dan data pimpinan serta muspida di Kabupaten Sleman.

2. Menu bar atas

Menu bar adalah navigasi menu guna memudahkan pengguna menemukan konten atau informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Pemilihan menu-menu yang ditampilkan pada menu bar didasarkan oleh kebutuhan pengguna dan tingginya intensitas pengguna membuka menu-menu tersebut. Pada halaman muka terdapat sejumlah menu yaitu :

a. Agenda

Agenda berisi tentang jadwal-jadwal kegiatan pimpinan yang terbuka untuk diikuti langsung oleh masyarakat umum dan wartawan. Selain itu agenda juga merupakan salah satu promosi

b. Galeri photo

Di galeri foto, pengguna dapat melihat dokumentasi berbagai kegiatan yang digelar setiap bulannya.

c. Surat Warga

Surat warga merupakan wadah komunikasi dari masyarakat kepada pimpinan. Melalui surat warga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan dan aduan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sleman.

d. Subdomain

Subdomain merupakan website yang dikelola khusus oleh satuan kerja perangkat daerah atau instansi di dalam Pemkab Sleman. Saat ini di Pemkab Sleman telah tersusun sejumlah 48 sub domain yang terdiri dari 29 sub domain instansi, dan 17 sub domain kecamatan dan 2 sub domain desa.

e. Prestasi

Data prestasi merupakan salah satu data yang sering diakses publik terkait dengan tingginya jumlah kunjungan kerjadan dinas dari luar daerah ke kabupaten Sleman.

f. Sistem Informasi

Pada menu ini pengguna dapat menemukan sejumlah sistem informasi yang dipergunakan sebagai salah satu sarana pencarian informasi. Beberapa sistem informasi yang ada di Pemkab Sleman

Perpustakaan, Sistem Informasi Aset dan Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum.

g. Menu Pilihan Bahasa

Menu ini untuk memudahkan pengguna dalam memilih bahasa. Pengguna dapat memilih menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris dalam menggunakan website

3. Link Banner Kiri

Link banner merupakan icon-icon yang mewakili link yang sering dibutuhkan pengguna. Pada link banner kiri disusun icon-icon diantaranya link banner intranet, link banner lokasi, alamat dan email instansi, kota tampilan posting surat warga, link banner CCTV BPTIK, link banner PPID, link banner JDIH, link banner LPSE, link banner erupsi Merapi 2010 dan kotak link banner portal-portal pemerintah pusat seperti KPU RI, MPR, DPR, Depkominfo, Depdagri, dll)

4. Menu tengah

Menu tengah berisi pengumuman berkala, jendela posting terbaru, publikasi, Pengumuman lingkungan hidup, link banner layanan publik online, tampilan 3 berita terakhir setiap haru, menu informasi kuliner dan informasi obyek wisata

5. Link Banner Kanan

Pada bagian kanan website menu berisi Open Source Sleman, box menu
Komentar Warga, box menu Agenda Terbaru dan box menu Update

6. Menu footer

Menu footer terdiri atas data statis fisik dan infrastruktur, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan keuangan daerah.

D. PRAKTEK E- GOVERNMENT DI INDONESIA

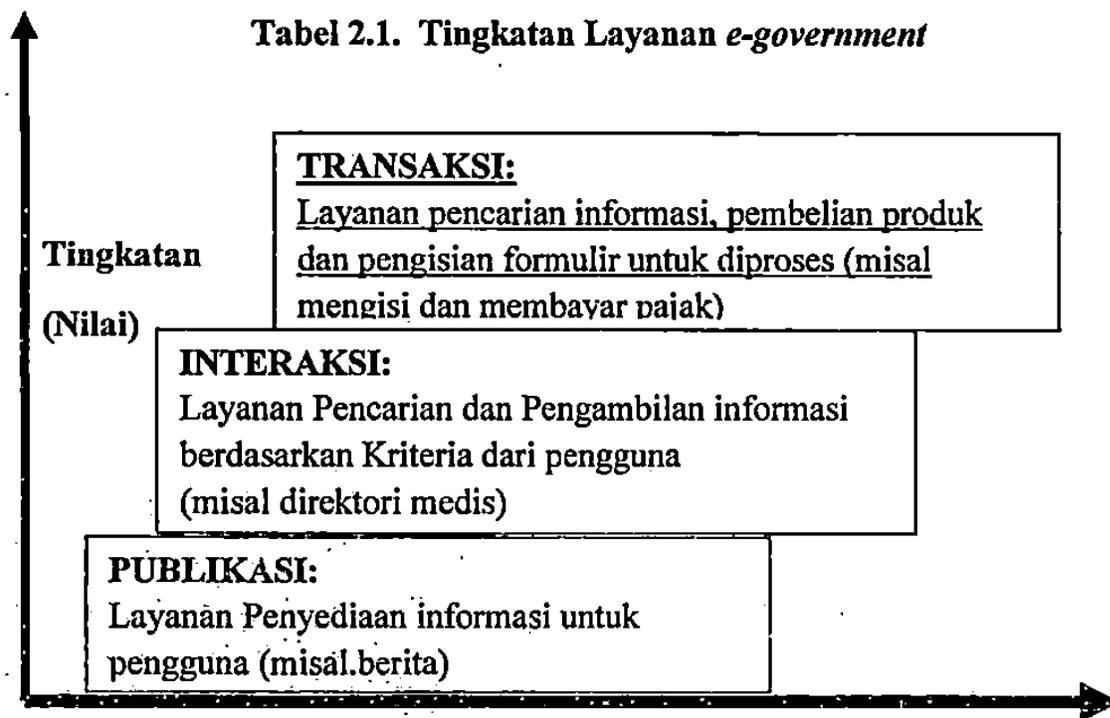
Terintegrasinya sistem teknologi dan informasi dewasa ini mempengaruhi lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *electronic-government (e-government)* yang diterapkan di Indonesia. *e-government* pada dasarnya berprinsip pada efektifitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang bisa melahirkan profesionalitas. Inilah salah satu tantangan pemerintah daerah. Praktik *e-government* di Indonesia memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah, masyarakat dan swasta atau kalangan yang berkepentingan (*stakeholders*)
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi *ICT* (terutama internet) sebagai alat.

3. Tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan efisiensi

Upaya pengembangan *e-government* dapat dilakukan dalam beberapa tahap atau tingkatan. Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui *e-government*.

Berdasarkan dua aspek di atas maka tingkat layanan *e-government* dalam gambar berikut (Indrajit, 30):



Kompleksitas

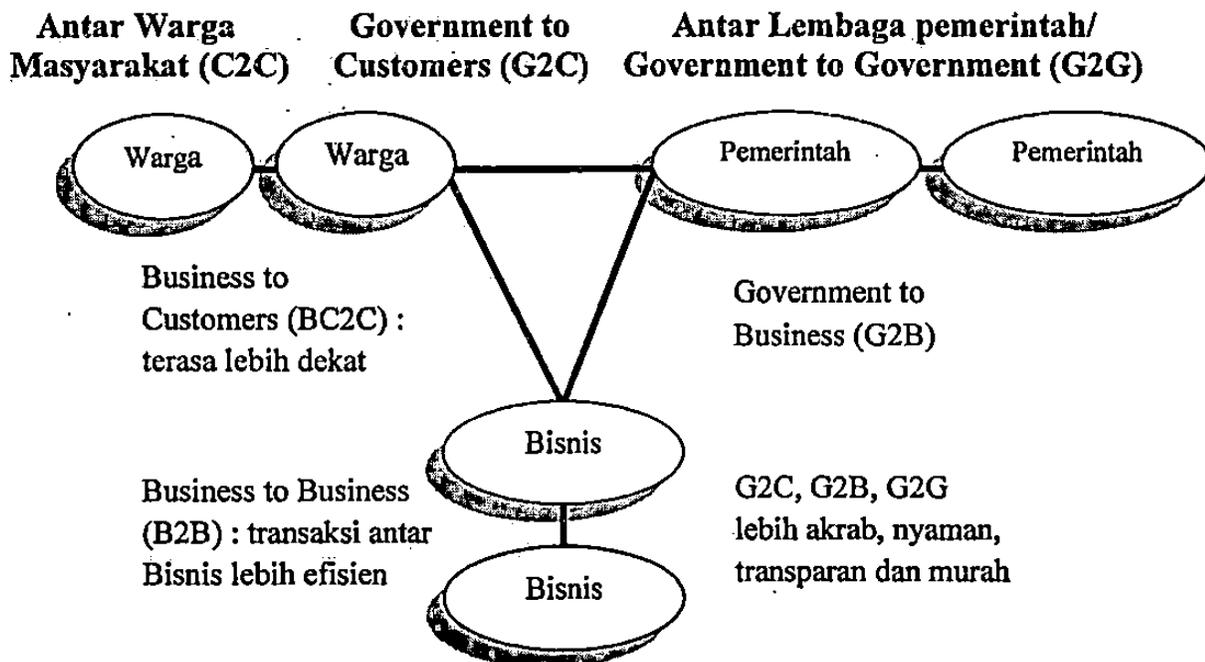
Sumber: PIU UK 2000, Fig. 4.1. dalam Achmad Djunaedi, 2003, Beberapa

Pemikiran Penerapan *e-government* dalam Pemerintah Daerah Di

Gambar tersebut menunjukkan ada tingkatan layanan utama dalam *e-government* yaitu: *Publish, Interact, Transact*. Tingkatan tersebut dapat dijadikan ukuran untuk melihat seberapa besar kemampuan pemerintah memanfaatkan secara optimal dari teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti : G2C (*Government to Citizen*), GTB (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*Government to Government/interagency relationship*), G2E (*Government to Employees*). Adapun bentuk interaksi antar pelaku seperti pada bagan 2 berikut:

Tabel 2.2 Tipe Relasi dalam *e-government*



Sumber : Achmad Djunaedi, 2003, Beberapa Pemikiran Penerapan

e-government dalam pemerintahan Daerah di Indonesia, hal 2

Sementara itu, menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan yaitu: *Support, Capacity, dan Value* (Indrajit, 2002: 15)

Pertama, *Support*. Tanpa adanya unsur *political will* ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top-down, maka jelas dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi

Kedua, *Capacity*. Yang dimaksud elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan *e-government* menjadi kenyataan.

Ketiga, *Value*. Elemen pertama dan kedua merupakan dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan berguna apabila tidak ada pihak yang merasa diperhitungkan. Dengan adanya implementasi konsep tersebut; yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan

Sedangkan untuk penerapan *e-government* di Indonesia sendiri dibidani oleh adanya Instruksi Presiden No. 23/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government*. Walaupun demikian jauh sebelum

adanya Inpres No. 23/2003 lahir, beberapa pemerintah daerah sudah terlebih dahulu menggagas serta menerapkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik atau *e-government* dalam skala terbatas. Pemerintah Kabupaten Takalar di Propinsi Sulawesi Selatan tampil sebagai daerah pelopor pertama penerapan teknologi informasi atau *e-government* di tingkat pemerintah daerah. Kabupaten Takalar mulai menerapkan Teknologi Informasi melalui sebuah bentuk sistem yang dinamakan Sistem Pelayanan Satu Atap atau disingkat SIMTAP sejak tahun 2000 (Ibrahim Syah, 2003: 1-2).

Pada tahun-tahun berikutnya, sejumlah daerah yang memiliki APBD berlimpah membangun infrastruktur *e-government* secara lengkap, seperti Kabupaten Kutai Kertanegara. Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur ini mengeluarkan dana milyaran rupiah untuk membangun Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP). Begitu juga dengan pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Kota Bogor di Jawa Barat, Kota Tarakan di Sulawesi, Kota Denpasar di Bali, Kota Yogyakarta di DIY, sementara pulau Sumatera mencanangkan *Sumatera Online* untuk mengintegrasikan sembilan propinsi dalam satu atap.

Meski sebagian instansi pemerintah daerah tengah memacu diri menerapkan *e-government*, bukan berarti semuanya melakukan hal demikian. Ada banyak instansi atau daerah lain yang belum terjamah *e-government*. Gebyar *e-government* di kawasan Indonesia Timur seperti NTB, NTT, Papua belum marak. Masih ada juga daerah yang belum memiliki website

Sejak Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* diluncurkan 9 Juni 2003 lalu, implementasi *e-government* di Indonesia mulai terasa gaungnya. Setidaknya penerapan *e-government* telah memiliki pijakan sekaligus lebih terarah. Sebab, dalam Inpres tersebut, para pejabat teras diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Yang tak kalah pentingnya, mereka diminta untuk merumuskan dan melaksanakan rencana dilingkungan masing-masing sembari berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, lembaga/instansi Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki situs web sebagai salah satu bentuk layanan masyarakat atau telah melaksanakan Inpres No 3 tahun 2003 masih rendah. Berdasarkan data Depkominfo dari 471 pemda yang memiliki situs web hanya 226 pemda atau 48% . Dari jumlah tersebut , 198 situs (42%) yang dikelola secara aktif. Untuk menguji kinerja website *e-government* yang dikelola instansi Pemda dalam memberikan pelayanan publik, maka perlu dilakukan evaluasi website *e-government* di lingkungan instansi pemda.

Sekarang ini penerapan *e-government* Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia yang dapat dijadikan contoh walaupun pada pelaksanaannya secara umum penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia kurang baik, namun ada beberapa daerah yang sudah mengalami perbaikan dalam manajemen

pemerintah daerah dengan penerapan *e-government* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima yaitu: Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dan Kota Pare-pare Propinsi Sulawesi Selatan. Kedua daerah ini telah menjadi proyek percontohan pelayanan publik yang prima dengan pemanfaatan *e-government* di Indonesia (Sonya Hellen Sinombor dan Reny Sri Ayu Taslim, [http:// www.kompas.co.id/ kompas- cetak/0612/09/Fokus/3154855.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0612/09/Fokus/3154855.htm)). Selain di kedua daerah itu pemerintah daerah lain yang sudah menggunakan *e-government* dalam memberikan pelayanan publik adalah Kota Jogjakarta di Propinsi DIY dan Kabupaten Jembrana Propinsi Bali.

Permasalahan - permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan penerapan *e-government* di pemerintah daerah sebenarnya membutuhkan manajemen kerja yang profesional, efektif dan efisien sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, komunikasi dapat berjalan dengan baik di pemerintah daerah mulai dari tingkat Pemerintah Propinsi sampai tingkatan yang paling rendah yaitu pemerintah Nagari dan Kelurahan. Sehingga pelayanan publik yang prima dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian perlu kajian yang lebih dalam dan komprehensif mengenai kajian penerapan *e-government* di pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik prima di Pemerintah Daerah Sumatera Barat.